

# **CORRESPONDENCE THEORY OF TRUTH: REALISASI JANJI POLITIK KEPALA DAERAH TERPILIH MENUJU LAMPUNG BARAT HEBAT**

**Nauril Padli<sup>1</sup>, Ari Darmastutiz, Arizka Warnagegara<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, <sup>2,3</sup> Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung  
Email: nauril@gmail.com

## **ABSTRACT**

The election of regional heads in the reform era was directly elected by the community, meaning that the election of candidates for regional head candidates was absolutely in the hands of the people. The existence of direct elections has an impact on the various political promises offered by candidates in order to attract voters' sympathy to choose the candidate at the time of the election. This study uses the Correspondence theory of truth, meaning that the researcher wants to find out whether the political promises promised by the regional head candidates at the time of the election have been realized in real terms, can be utilized, felt by the community. Candidates for the elected regional head or regent of West Lampung Regency in the 2017 regional elections, namely pair number (1), Parosil Mabsus and Mad Hasnurin at the time of the campaign offered various work programs or political promises summarized in pitu (seven) superior programs. Therefore, the aim of this research is to find out whether the 7 (pitu) political promise programs of the elected regional heads in the 2017 West Lampung Regency Regional Head Election have been fully realized and to find out the inhibiting factors that have not realized the political promises of the elected regional heads to the Great West Lampung in the Head Election. West Lampung Regency Region 2017.

The research method used a qualitative approach, and used interview, observation and documentation data collection tools, while the respondents in this study were policy makers, beneficiaries and observers. The results of this research are: a) The realization of the political promise of the elected regional head of West Lampung Regency for the period 2017-2022, up to 2 (two) years of leadership can be seen from the pitu (seven) political promise programs, there are only 4 programs and 18 activities that are correct. fully realized while 3 (three) programs and 8 (eight) activities that have not been fully realized 2) The inhibiting factor has not been realized the political promise of the elected regional head Towards Great West Lampung in the Regional Head Election of West Lampung Regency 2017 is influenced by 3 (three) factors, namely 1). Limited regional financial capacity of West Lampung Regency, 2) The long processing time and completion of programs and activities and 3) Limited competent human resources in completing programs and activities.

**Keywords: Realization, Political Promises, and Regional Heads**

## ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah pada era reformasi dipilih langsung oleh masyarakat, artinya terpilih atau tidak terpilihnya calon kandidat kepala daerah, secara mutlak berada penuh ditangan masyarakat. Adanya pemilu secara langsung ini berdampak pada berbagai janji politik yang ditawarkan oleh kandidat dalam rangka menarik simpati pemilih agar mau memilih kandidat tersebut pada saat pemilihan berlangsung. Penelitian ini menggunakan **teori kebenaran korespondensi (Correspondence theory of truth)**, artinya peneliti ingin mengetahui apakah janji politik yang dijanjikan kandidat kepala daerah pada saat pemilihan, sudah direalisasikan secara benar nyata, dapat dimanfaatkan, dirasakan oleh masyarakat. Calon kepala daerah atau bupati terpilih Kabupaten Lampung Barat pada pilkada 2017 yaitu pasangan nomor urut (1), Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin pada saat kampanye menawarkan berbagai Program kerja atau janji politik yang dirangkum dalam pitu (tujuh) program unggulan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 7 (pitu) program janji politik kepala daerah terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017 **sudah benar terealisasi** sepenuhnya serta mengetahui faktor penghambat belum terealisasinya janji politik kepala daerah terpilih menuju Lampung Barat Hebat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, serta menggunakan alat pengumpul data wawancara, observasi dan dokumentasi, adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pengambil kebijakan, penerimaan manfaat dan pengamat. Hasil penelitian ini adalah: a) Realisasi janji politik kepala daerah terpilih Kabupaten Lampung Barat periode tahun 2017-2022, sampai dengan 2 (dua) tahun kepemimpinannya dapat diketahui dari pitu (tujuh) program janji politik hanya ada 4 program dan 18 kegiatan yang **benar sudah di realisasikan sepenuhnya** sedangkan 3 (tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan **yang belum terealisasi sepenuhnya** 2) Faktor penghambat belum terealisasinya janji politik kepala daerah terpilih Menuju Lampung Barat Hebat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017 dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu 1). Terbatasnya kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lampung Barat, 2) Lamanya waktu proses pengerjaan dan penyelesaian program dan kegiatan dan 3) Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam menyelesaikan program dan kegiatan.

**Kata Kunci: Realisasi, Janji Politik, dan Kepala Daerah**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Metode pemilihan kepala daerah baik Gubernur, Bupati maupun Walikota pada era reformasi mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam proses pesta demokrasi di Indonesia, dimana sebelum era reformasi metode pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai wakil rakyat, namun sekarang metode pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat. Artinya terpilih atau tidak terpilihnya calon kandidat kepala daerah, secara mutlak berada penuh ditangan masyarakat.

Adanya kebijakan pemilihan kepala daerah secara langsung memunculkan strategi bersaing yang diterapkan oleh calon kandidat kepala daerah, dalam rangka menarik simpati masyarakat agar mau memilih calon kandidat kepala daerah tersebut sehingga mampu memenangkan persaingan.

Berbagai program yang ditawarkan oleh kandidat mulai dari isu peningkatan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, atau lazimnya disebut “Janji Politik” yang kesemuanya itu dikemas dalam rangka menarik simpati masyarakat agar mau memilih kandidat tersebut pada saat

pemilihan berlangsung. Permasalahannya sekarang adalah, aneka janji politik yang sejatinya sebagai etika sosial dan bagian dari peradaban yang terkait dengan niat serta komitmen kandidat untuk mensejahterakan rakyat dan menegakkan keadilan atau tidak melakukan sesuatu yang menyimpang, hanya di jadikan strategi atau siasat guna memperoleh dukungan suara dari masyarakat. Hal tersebut cukup beralasan mengingat pasca dilakukannya pemilu banyak kepala daerah terpilih yang “tidak merealisasikan janji-janji politiknya”.

Berahirnya masa jabatan kepala daerah Mukhlis Basri dan Makmur azhari pada tahun 2017 dilakukan kembali pilkada serentak di Kabupaten Lampung Barat, tepatnya pada tanggal 17 Februari 2017 yang di ikuti oleh dua pasang calon kepala daerah dengan nomor urut (1) yaitu, Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin. sedangkan Nomor urut (2), yaitu Edy Irawan Arief dan Ulul Azmi Soltiansa. Pada kesempatan ini calon kepala daerah atau bupati terpilih Kabupaten Lampung Barat pada pilkada 2017 yaitu pasang calon kepala daerah dengan nomor urut (1), Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin pada saat kampanye menawarkan berbagai Program kerja atau janji politik yaitu Menuju Lampung Barat Hebat, kata Hebat yang berarti (Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman dan Taqwa) yang dirangkum dalam pitu (tujuh) program unggulan.

Penelitian ini menggunakan teori kebenaran korespondensi (*Correspondence theory of truth*), artinya peneliti ingin mengetahui apakah janji politik yang dijanjikan kandidat kepala daerah pada saat pemilihan, sudah direalisasikan secara benar nyata, dapat dimanfaatkan, dirasakan oleh masyarakat, adanya

keselarasan antara pernyataan yang diucapkan atau yang dijanjikan pada saat kampanye dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan setelah kepala daerah tersebut terpilih serta mengetahui apakah janji politik sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena berdasarkan hasil observasi pendahuluan peneliti bahwa program/ janji politik menuju Lampung Barat Hebat yang di janjikan oleh kepala daerah terpilih pada pilkada 2017, setelah dua (2) tahun berjalan kepemimpinannya terdapat masyarakat yang menganggap/merasa bahwa masih ada program unggulan yang di janjikan oleh kepala daerah terpilih pada pilkada 2017 belum benar-benar terealisasi sepenuhnya.

Berpijak dari latar belakang di atas peneliti tertarik akan meneliti sejauh mana realisasi atau program kerja yang dilakukan oleh kepala daerah dua (2) tahun berjalan kepemimpinannya apakah memang belum terealisasi atau sudah terealisasi namun belum begitu terasa dampaknya terhadap masyarakat Lampung Barat. Oleh sebab itu berdasarkan penjelasan dan berbagai permasalahan di atas penulis tertarik ingin meneliti “Realisasi Janji Politik Kepala Daerah Terpilih Menuju Lampung Barat Hebat, pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017”

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah 7 (pitu) program janji politik kepala daerah terpilih menuju Lampung Barat Hebat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017 sudah benar terealisasi sepenuhnya serta untuk mengetahui faktor penghambat belum terealisasinya janji politik kepala daerah terpilih menuju Lampung Barat Hebat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsepsi Janji Politik

Mengutip pendapat Sutoro, (2013:148) “janji politik adalah segala hal ikhwal (biasanya ditujukan untuk memenuhi aspirasi pemilih) yang diiming-imingkan dalam kampanye oleh parpol dan/atau calon kepada pemilih untuk dilaksanakan apabila dipercaya dan terpilih menduduki kursi, baik legislatif (DPR/D, DPD, Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa)”. Bagi pemilih, janji politik pada dasarnya menunjukkan harapan (*expectation*) akan apa yang akan dikerjakan calon untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan serta menjawab permasalahan yang dihadapi pemilih, pada konteks itulah janji politik penting dan perlu, karena janji politik itulah satu faktor kunci yang mempengaruhi kemenangan calon dalam Pemilu.

Pendapat lain dikemukakan Napitupulu (2010:129) “janji politik adalah janji calon perseorangan untuk mengenalkan atau memaparkan visi dan misi program-program kerja dengan tujuan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan hak suaranya kepada calon tersebut”. Senada dengan pendapat Nihayah (2013:166) yang menyatakan bahwa “janji politik merupakan proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat dan tingkah laku pemilih, perubahan ini ingin dicapai melalui himbauan, ajakan, dan janji sehingga membuat warga atau kelompok masyarakat tertarik dan simpati untuk menjatuhkan pilihan politiknya pada partai atau kandidat tertentu”.

Jika dilihat dari pandangan politik, janji calon pemimpin yang akan mengikuti kegiatan pemilihan umum akan diutarakan pada saat waktu kampanye. Janji yang ada di dalam

kampanye biasanya merupakan salah satu strategi kemenangan dalam berpolitik. Pada saat itulah para calon pemimpin memaparkan program-program terbaik yang sudah mereka rencanakan. Tujuannya untuk menarik simpati rakyat agar bisa mendukung calon pemimpin sampai bisa mengantarkan ke arah kemenangan. Mereka akan saling berlomba untuk mendapatkan suara terbanyak dari rakyat. Janji politik sangat penting karena dari sanalah pemilih dapat membaca tekad, visi, misi dan intensi seseorang maju menjadi kandidat untuk menduduki jabatan tertentu.

Mengutip pendapat Ghafur (2015:118) “banyak manuver yang dilakukan calon-calon pemimpin untuk menarik dukungan atau simpati masyarakat, salah satu yang paling sering dilakukan adalah menjanjikan sesuatu hal yang baik kepada masyarakat”. Umumnya isi janji politik ini meliputi kebijakan umum seperti menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan, memberikan akses berupa modal untuk berwirausaha, tidak akan menaikkan harga bensin dan kebutuhan pokok, ataupun janji untuk mengatasi berbagai masalah di daerah tersebut seperti banjir, kemiskinan, dan kemacetan.

Permasalahannya sekarang adalah, aneka janji politik yang sejatinya sebagai etika sosial dan bagian dari peradaban yang terkait dengan niat serta komitmen kandidat untuk mensejahterakan rakyat dan menegakkan keadilan atau tidak melakukan sesuatu yang menyimpang, hanya di jadikan strategi atau siasat guna memperoleh dukungan suara dari masyarakat. Hal tersebut cukup beralasan mengingat pasca dilakukannya pemilu banyak kepala daerah terpilih yang “tidak merealisasikan janji-janji politiknya”.

Fenomena semacam ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Helen Pascalia Sitompul (2016), dengan rumusan permasalahan bagaimana implementasi kebijakan politik bupati Labuhanbatu Utara, Khairuddin Syah setelah menjadi kepala daerah di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis relevansi dari janji-janji politik Khairuddin Syah di Kabupaten Labuhan Batu Utara selama satu periode pemerintahannya, yang melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kesehatan, Kepala Dinas PU dan bupati serta menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa janji-janji politik belum diimplementasikan secara keseluruhan. Masih ada beberapa janji-janji politik yang belum terealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang masih berjalan dengan sangat lambat.

### **Konsepsi Teori Kebenaran korespondensi (*Correspondence theory of truth*)**

Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Teori ini banyak dikembangkan oleh Bertrand Russell (1972-1970). Teori kebenaran korespondensi, *Correspondence Theory of Truth* yang kadang disebut dengan *accordance theory of truth*, sebagaimana dikutip Moore, dan Ramsey (1972-1970) dalam Setiawan (2018:156) adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta

atau pernyataan yang ada atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Sederhananya, suatu pernyataan dianggap benar jika ada faktanya. Jika tidak, maka pernyataan tersebut bukan kebenaran. Ilustrasi sederhana sebuah pernyataan “di luar terjadi hujan” dianggap benar jika terdapat fakta obyektif di luar sana benar-benar terjadi hujan. Peristiwa turunnya air dari angkasa harus bias ditangkap oleh panca indera. Jika tidak bisa ditangkap oleh panca indera, maka peristiwa hujan itu bukan merupakan fakta, melainkan hanya peristiwa delusif yang hanya berada dalam imajinasi si pemberi pernyataan. Dalam dunia politik teori ini memegang peranan penting untuk melihat seberapa jauh kebenaran janji politik yang di ucapkannya selama kampanye berlangsung dengan kenyataan merealisasikan janji politik setelah terpilih. Penggunaan teori *accordance theory of truth* sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Etjung Widhiarto, Slamet Rosyadi, dan Denok Kurniasih (2016), dengan rumusan permasalahan bagaimana realisasi formulasi Kebijakan Kartu Banyumas Sehat yang melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, kepala Dinas Kesehatan, dan bupati serta menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa janji kampanye program kesehatan Bupati Kabupaten Semarang yang berupa program kesehatan gratis memang benar-benar direalisasi. Artinya, jika dikaitkan dengan janji politik, maka dapat di asumsikan janji politik itu benar jika

janji politik tersebut teralisasi dengan nyata, bukan hanya angan-angan, dan janji politik tersebut dapat dimanfaatkan, dirasakan oleh masyarakat, adanya keselarasan antara pernyataan yang diucapkan atau yang dijanjikan pada saat kampanye dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan setelah politikus tersebut terpilih.

Berdasarkan teori di atas maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kebenaran korespondensi (*Correspondence theory of truth*) karena teori ini sangat relevan, sesuai dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Dimana diketahui sebelumnya bahwa pada tahun 2017 telah terjadi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lampung Barat, yang dimenangkan oleh pasangan Bupati terpilih nomor urut (1) yaitu, Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin, saat kampanye kepala daerah terpilih telah menawarkan berbagai Program kerja atau janji politik yaitu Menuju Lampung Barat Hebat, kata Hebat yang berarti (Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman dan Taqwa) yang dirangkum dalam pitu (tujuh) program unggulan yaitu 1) Peningkatan Infrastruktur Mantap, 2) Penataan Kota Liwa Sebagai Kota Budaya, 3) Semua Bisa Sekolah, 4) Pelayanan Masyarakat Sehat, 5) Mensejahterakan Petani, 6) Masyarakat Berdaya Saing dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik dan 7) Peningkatan Iman Dan Taqwa.

Merujuk kepada teori kebenaran korespondensi (*Correspondence theory of truth*), yang menyatakan bahwa sebuah pernyataan dianggap benar hanya jika pernyataan tersebut berhubungan dengan fakta obyektif yang ada. Fakta obyektif tersebut adalah segala bentuk fenomena berupa tampilan visual, gelombang suara, rasa maupun tekstur, yang bias ditangkap melalui panca indera, artinya “janji

politik” pasangan Bupati terpilih nomor urut (1) yaitu, Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin, yaitu pitu (tujuh) program unggulan yaitu 1) Peningkatan Infrastruktur Mantap, 2) Penataan Kota Liwa Sebagai Kota Budaya, 3) Semua Bisa Sekolah, 4) Pelayanan Masyarakat Sehat, 5) Mensejahterakan Petani, 6) Masyarakat Berdaya Saing dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik dan 7) Peningkatan Iman Dan Taqwa “di anggap benar terealisasi” jika adanya keselarasan, konsistensi antara pernyataan yang diucapkan atau yang dijanjikan pada saat kampanye dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan setelah kepala daerah tersebut terpilih dengan kata lain janji politik yang dijanjikan kandidat kepala daerah pada saat pemilihan, sudah direalisasikan secara benar nyata, dapat dimanfaatkan, dirasakan oleh masyarakat.

Alasan penulis tidak menggunakan teori konsistensi, hal tersebut dikarenakan teori ini kurang sesuai dan relevan dalam menjawab permasalahan yang akan penulis teliti, dimana teori konsistensi menyatakan kebenaran dianggap benar bila pernyataan yang diucapkan saat ini konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Menurut teori konsistensi, sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar, hal tersebut tentu saja tidak relevan dikarenakan pasangan Bupati terpilih nomor urut (1) yaitu, Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin baru pertama kali mengikuti pemilu dan pertama kali menjadi kontestan dalam pemilihan kepala daerah, selain itu pitu (tujuh) program unggulan yang di stempel sebagai janji politik adalah janji politik yang perdana atau belum pernah dipakai oleh calon kepala daerah terpilih sebelumnya, jadi pitu (tujuh)

program unggulan belum terbukti kebenarannya apakah sudah terealisasi sepenuhnya atau tidak.

Demikian halnya dengan teori pragmatisme yang menyatakan bahwa suatu ucapan, hukum atau sebuah teori semata-mata bergantung pada asas manfaat, sesuatu dianggap benar bila mendatangkan keuntungan. Jika dikaitkan dengan pemilihan kepala daerah, masyarakat (pemilih) di butuhkan sesaat tak kala musim kampanye tiba. Setelah kampanye usai dan telah mendapatkan kekuasaan politik dan kepemilikan ekonomi yang menjadi sasaran utamanya, masyarakat (pemilih) tidak dipedulikan. Teori ini juga penulis anggap kurang sesuai dan relevan dalam menjawab permasalahan yang akan penulis teliti, hal tersebut disebabkan karena pasangan Bupati terpilih nomor urut (1) yaitu, Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin baru pertama kali menjadi kepala daerah Lampung Barat terpilih periode 2017, jadi belum bisa dijustifikasi apakah pasangan kepala daerah Lampung Barat terpilih ini mengabaikan masyarakat (pemilih) setelah menjadi kepala daerah.

### **Konsepsi Politik**

Menurut Budiarjo (2008:119) mengemukakan bahwa politik adalah kegiatan yang dilakukan dalam suatu negara menyangkut proses menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan tersebut, lebih jauh menekankan bahwa tujuan politik bukan untuk memenuhi kepentingan atau tujuan pribadi seseorang (*private goal*), melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Dalam pandangan para sarjana emerika, ilmu politik sebagai ilmu negara bukan lagi dalam pengertian institusi yang statis, tetapi lebih maju dengan melihat negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat

(Philips, 2016:56). Pada umumnya politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam satu sistem politik (Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan itu. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goal*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*).

### **Konsepsi Kontrak Politik / Kontrak Sosial**

Pendapat dikemukakan Rahayu (2010:183) “prinsip kontrak politik ialah *bonum commune* yang artinya kepentingan publik. Kepentingan publik harus memiliki dampak luas, antara lain hak atas pendidikan, kesehatan, kebebasan, dan hak yang diperjuangkan warga yang bersangkutan, seperti soal upah minimum. Catatan penting yang perlu diperhatikan sebelum pasangan calon membuat kesepakatan tersebut adalah perjuangan kepentingan publik tidak boleh bertentangan dengan hukum yang melindungi publik.

Pengertian kontrak sosial menurut Thomas Hobbes dalam Hampton (2009:855) "adalah sebuah perjanjian antara rakyat dengan para pemimpinnya, atau antara manusia-manusia yang tergabung di dalam komunitas tertentu". Secara tradisional, istilah kontrak sosial digunakan di dalam argumentasi yang berupaya menjelaskan hakikat dari kegiatan berpolitik atau menjelaskan tanggung jawab dari pemimpin kepada rakyat. Pemikiran Jhon Locke dalam Wijaya (2014:113) “kontrak sosial merupakan konsepsi tentang hubungan kekuasaan baru di antara penguasa dengan rakyat

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Alasan peneliti hanya menggunakan jenis penelitian kualitatif

adalah dikarenakan dalam menganalisa hasil penelitian hanya bersifat mendiskripsikan atau menggambar kan suatu fenomena dengan alat ukur wawancara, yaitu untuk mengetahui, apakah 7 (pitu) program janji politik kepala daerah terpilih menuju Lampung Barat Hebat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017 sudah benar terealisasi sepenuhnya dan apa faktor penghambat belum terealisasinya janji politik kepala daerah menuju Lampung Barat Hebat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017.

Adapun yang menjadi sumber informasi Sumber informan pada penelitian ini dipilih secara *non random* atau tidak secara acak dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu menentukan narasumber yang diwawancarai pada objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan atau fokus penelitian Alasan peneliti menggunakan *purposive* bertujuan untuk mengambil informan secara objektif, dengan anggapan bahwa informan yang diambil itu merupakan keterwakilan (*representatif*) bagi peneliti, sehingga pengumpulan data yang langsung pada sumber datanya dapat dilakukan secara proporsional demi keakuratan penelitian. Selain itu data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data homogen yang artinya bahwa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sama sehingga informan yang diwawancarai cukup sebagian. Teknik pengumpulan data adalah dengan 1) wawancara mendalam (*indepth-interview*), 2) observasi, dan 3) Dokumentasi. Teknik analisa data yaitu 1) Reduksi data, 2) Penyajian data, 3) Triangulasi data dan 4) Menarik kesimpulan

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Realisasi Janji Politik

Penilaian janji politik pada penelitian ini menggunakan teori kebenaran korespondensi (*Correspondence theory of truth*), artinya peneliti ingin mengetahui apakah janji politik yang dijanjikan kandidat kepala daerah pada saat pemilihan, sudah direalisasikan secara benar nyata, dapat dimanfaatkan, dirasakan oleh masyarakat, adanya keselarasan antara pernyataan yang diucapkan atau yang dijanjikan pada saat kampanye dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan setelah kepala daerah tersebut terpilih. Janji politik Bupati terpilih Lampung Barat dinilai benar terealisasi jika kenyataan dilapangan sudah direalisasikan secara benar nyata, tidak abstark, dan hasil dari janji politik itu dapat dimanfaatkan, dirasakan oleh masyarakat Lampung Barat. Berikut di jabarkan secara rinci hasil penelitian janji politik Bupati terpilih Lampung Barat yang didapat dari hasil survey lapangan dan wawancara dengan sejumlah narasumber:

Kesimpulan bab hasil penelitian menggambarkan bahwa dari pitu (tujuh) program janji politik kepala daerah terpilih Kabupaten Lampung Barat periode tahun 2017-2022, sampai dengan 2 (dua) tahun kepemimpinannya dapat diketahui ada 4 program dan 18 kegiatan yang benar sudah di realisasikan sepenuhnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Infrastruktur Mantap: hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Daerah Lampung Barat (Lampung Barat) terpilih periode tahun 2017-2022 benar telah mereleaisasikan program dan kegiatan tersebut, namun belum

- di realisasikan sepenuhnya. Wujud realisasi program tersebut adalah
- a) Peningkatan jalan poros penghubung kecamatan dan jalan kabupaten belum terealisasi sepenuhnya dengan rincian ruas jalan baru terealisasi 41,6% dan panjang ruas jalan baru terealisasi 30%
  - b) Pembangunan jembatan belum sepenuhnya terealisasi baru terealisasi 50%
  - a) Pembangunan irigasi belum sepenuhnya terealisasi baru terealisasi 8,2%
  - b) Pembangunan sarana air bersih belum sepenuhnya terealisasi, baru mencapai 40%
  - c) Pembangunan listrik belum sepenuhnya terealisasi baru terealisasi 69,85%
2. Program Penataan Kota Liwa Sebagai Kota Budaya: hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Daerah Lampung Barat (Lampung Barat) terpilih periode tahun 2017-2022 benar telah mereleaisasikan program dan kegiatan tersebut, namun belum di realisasikan sepenuhnya. Wujud realisasi program tersebut adalah:
- a) Penataan dan pembangunan ruang terbuka seperti alun-alun taman terbuka, pembangunan sarana dan prasaran perkotaan belum sepenuhnya terealisasi, baru mencapai 85%
  - b) Pembangunan rumah budaya belum sepenuhnya terealisasi, baru mencapai 65%
3. Program Semua Bisa Sekolah: hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Daerah Lampung Barat (Lampung Barat) terpilih periode tahun 2017-2022 benar telah mereleaisasikan program dan kegiatan tersebut, sepenuhnya.
- Wujud realisasi program tersebut adalah:
- a) Mengangkat guru honor murni menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak sudah terealisasi 100%,
  - b) Pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan seragam gratis sudah sepenuhnya terealisasi, 100%
  - c) Bantuan bagi siswa berprestasi yang diterima diperguruan tinggi negeri, meningkatkan mutu pendidikan dan mewujudkan mimpi masyarakat kecil untuk menjadi dokter melalui program beasiswa bagi siswa Lampung Barat berprestasi sudah terealisasi juga 100%.
4. Program Pelayanan Masyarakat Sehat hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Daerah Lampung Barat (Lampung Barat) terpilih periode tahun 2017-2022 benar telah mereleaisasikan program dan kegiatan tersebut, sepenuhnya. Wujud realisasi program tersebut adalah:
- a) Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan rumah sakit daerah, penambahan tenaga medis dan pramedis sudah terealisasi 100%
  - b) Memberi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin di Luar Kuota dengan target 10.000 jiwa. Pelayanan pasien kurang mampu Jamkesmas/JKN PBI dengan target 840 orang, ini pun sudah terealisasi 100%.
5. Program Mensejahterakan Petani: hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Daerah Lampung Barat (Lampung Barat) terpilih periode tahun 2017-2022 benar telah mereleaisasikan program dan kegiatan tersebut, sepenuhnya.

Wujud realisasi program tersebut adalah:

- a) Penyaluran pupuk bersubsidi melalui badan usaha milik pekon sudah terealisasi 100%
  - b) Bantuan sarana dan prasarana pertanian yang diberikan kepada petani melalui kelompok tani Kabupaten Lampung Barat yang berupa alsintan dan saprodisedah terealisasi 100%
  - c) Bantuan gabah sebanyak 1 ton/kelompok tani. yang ada di daerah/pekon tertinggal dan belum berkembang sudah terealisasi 100%
6. Program Masyarakat Berdaya Saing dan Peningkatan Kinerja Pelayan Publik: hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Daerah Lampung Barat (Lampung Barat) terpilih periode tahun 2017-2022 benar telah mereleaisasikan program dan kegiatan tersebut, namun belum terealisasi sepenuhnya, masih ada satu kegiatan yang belum terealisasi, adapun wujud realisasi program tersebut adalah:
- a) Pemberdayaan pemuda dan kelompok perempuan melalui rumah produktif dan kreatif untuk menciptakan lapangan kerjabelum sepenuhnya terealisasi, baru mencapai 20%
  - b) Optimalisasi potensi wisata melalui pengembangan desa-desa wisata, sudah terealisasi. Pemkab Lampung Barat mendukung penuh untuk mewujudkan desa wisata di Kabupaten Lampung Barat, sudah sepenuhnya terealisasi, 100%
  - c) Merelalisasikan kegiatan mempercepat penyelesaian penegasan tapal batas belum Terealisasi sepenuhnya baru mencapai 74,5%
  - d) Meningkatkan insentif aparatur pekon, sudah di realisasikan 100%
  - e) Pelayanan publik yang mudah, cepat, tepat, murah / gratis dan transparan, juga sudah direalisasikan 100%.
7. Program Peningkatan Iman dan Taqwa: hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Daerah Lampung Barat (Lampung Barat) terpilih periode tahun 2017-2022 benar telah mereleaisasikan program dan kegiatan tersebut sepenuhnya. Wujud realisasi program tersebut adalah:
- a) Bantuan bedah rumah bagi rumah tidak layak huni, sudah terealisasi 100%.
  - b) Target 100 orang jamaah umrah dan 8 orang peserta wisata rohani sudah terealisasi 100%.
  - c) Kegiatan meningkatkan insentif guru ngaji, imam masjid, marbot, sudah terealisasi 100%.
  - d) Kegiatan meningkat nilai serta jumlah penerima bantuan rumah ibadah dan pondok pesantren / lembaga pendidikan keagamaan, sudah teralisasi 100%

Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat diketahui bahwa 7 (pitu) program janji politik kepala daerah terpilih menuju Lampung Barat Hebat pada pemilihan kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017 sudah benar terealisasi meskipun masih terdapat beberapa program kegiatan yang belum terealisasi sepenuhnya, artinya hasil penelitian ini menggambarkan atau bermakna bahwa janji politik kepala daerah terpilih Kabupaten Lampung Barat pasang nomor urut (1) yaitu, Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin sudah **“benar”** terealisasi dan program kegiatan dari janji politik tersebut hasilnya sesuai

dengan janji yang telah diucapkan pada saat pencalonan kepala daerah, bukan hanya angan-angan saja atau janji-jani palsu sehingga janji politik kepala daerah terpilih tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena jika merujuk kepada teori kebenaran korespondensi (*Correspondence theory of truth*), sebagaimana dikutip Moore, dan Ramsey (1972-1970) dalam Setiawan (2018:156) menyebutkan kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan, atau sebuah pernyataan dianggap benar hanya jika pernyataan tersebut berhubungan dengan fakta obyektif yang ada.

Secara sederhana suatu pernyataan dianggap benar jika ada faktanya, jika tidak, maka pernyataan tersebut bukan kebenaran. Artinya, jika dikaitkan dengan janji politik, maka dapat diasumsikan janji politik itu benar jika janji politik tersebut teralisasi dengan nyata, bukan hanya angan-angan, dan janji politik tersebut dapat dimanfaatkan, dirasakan oleh masyarakat, adanya keselarasan antara pernyataan yang diucapkan atau yang dijanjikan pada saat kampanye dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan setelah politikus tersebut terpilih. Pilkada bukan sekedar ajang pemilihan setiap lima tahun sekali, namun juga momen untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Firmanzah (2012: 156), janji politik bukanlah konsep untuk menjual partai politik atau kandidat individu ke pemilih, namun sebuah konsep yang menawarkan bagaimana sebuah partai politik atau kandidat individu bisa membuat program yang berhubungan dengan permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat. Mengutip pendapat Sutoro, (2013:148) “janji politik adalah segala hal ikhwal (biasanya ditujukan untuk

memenuhi aspirasi pemilih) yang diiming-imingkan dalam kampanye oleh parpol dan/atau calon kepada pemilih untuk dilaksanakan apabila dipercaya dan terpilih menduduki kursi, baik legislatif (DPR/D, DPD, Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa)”.

### **Faktor Penghambat**

Dalam rangka meraup suara daricalon pemilih (masyarakat), biasanya banyak calon yang dipilih (kandidat) mengumbar janji-janji politik yang tidak rasional, tanpa memikirkan apakah program janji politik yang ditawarkan kepada calon pemilih (masyarakat) dapat terealisasi atau tidak, akibatnya pasca pemilihan berlangsung menimbulkan permasalahan kompleks, diantaranya adalah sulitnya merealisasikan janji politik kepala daerah terpilih yang di sebabkan oleh berbagai aspek, mulai dari keterbatasan kemampuan keuangan/anggaran daerah, terbatasnya SDM yang akan melaksanakan program janji politik, terbatasnya waktu menyelesaikan program janji politik, karena notabene masa jabatan politik kepala daerah terpilih hanya 5 (lima) tahun. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat (Lampung Barat) terpilih periode tahun 2017-2022 adalah Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin. Beragam program kerja baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menuju Lampung Barat Hebat (Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman dan Taqwa) sebagaimana yang telah di rangkum dalam Pitu (Tujuh) Program yang dijadikan janji politik Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui masih terdapat beberapa janji politik Bupati dan Wakil Bupati

Lampung Barat (Lampung Barat) terpilih periode tahun 2017-2022 yang sampai 2 (dua) tahun kepemimpinannya belum terealisasi sepenuhnya

disebabkan oleh beberapa kendala, berikut di jelaskan kedalam tabel sebagai berikut:

**Tabel Faktor Penghambat Janji Politik Kepala Daerah Terpilih**

<b>Program</b>	<b>Realisasi Kegiatan</b>	<b>Hasil Capaian</b>	<b>Penyebab</b>
<b>Peningkatan Infrastruktur Mantap</b>	<b>Peningkatan jalan poros penghubung kecamatan dan jalan kabupaten:</b> 1. Ralisasi 67 ruas jalan kabupaten target 161 ruas jalan kabupaten 2. Ralisasi total panjang ruas jalan 21,79 Km target 72,56 Km	Belum Terealisasi Sepenuhnya	Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah
	<b>Pembangunan jembatan:</b> Realisasi 4 unit jembatan target 8 unit jembatan	Belum Terealisasi Sepenuhnya	Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah
	<b>Pembangunan irigasi</b> Realisasi 13 ruas jaringan irigasi untuk mengairi 120 hektare (Ha) areal persawahan, target luas jaringan irigasi adalah 1.447 Ha	Belum Terealisasi Sepenuhnya	Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah
	<b>Pembangunan listrik</b> Persentase rumah tangga di Kabupaten Lampung Barat yang menggunakan listrik sampai kurun waktu 2019 yaitu sekitar 69,85% target 100%	Belum Terealisasi Sepenuhnya	Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah
	<b>Pembangunan sarana air bersih</b> Target di 5 pekon yaitu Trimekarjaya Bandaragung, Srimulio, Suoh dan Gunungratu target penyelesaian tahun 2020	Belum Terealisasi Sepenuhnya	Terbatasnya waktu dan Kemampuan Keuangan Daerah
<b>Penataan Kota Liwa Sebagai Kota Budaya</b>	<b>Penataan dan pembangunan ruang terbuka seperti alun-alun taman terbuka, pembangunan sarana dan prasarana perkotaan.</b> Pembangunan dilakukan bertahap, dan belum tuntas seluruhnya seperti belum adanya drainase, pemberian lampu, ornamen dan nomenklatur, target penyelesaian akhir tahun 2020	Belum Terealisasi Sepenuhnya	Terbatasnya waktu dan Kemampuan Keuangan Daerah

	<p><b>Pembangunan rumah budaya</b>                  Pelaksanaan pembangunan diperkirakan akan memakan waktu selama tiga tahun anggaran dengan target tahun 2022 telah selesai bahkan sudah bisa digunakan, termasuk kegiatan penataan tamannya, pelataran parkir dan pembangunan pagarnya pun juga <i>clear</i>.</p>	Belum Terealisasi Sepenuhnya	Terbatasnya waktu Kemampuan Keuangan Daerah
<p><b>Masyarakat Berdaya Saing dan Peningkatan Kinerja Pelayan Publik</b></p>	<p><b>Pemberdayaan pemuda dan kelompok perempuan melalui rumah produktif dan kreatif untuk menciptakan lapangan kerja</b>                  Saat ini Pemkab Lampung Barat, melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Lambar dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para pelaku usaha sedang melaksanakan tahap <i>Fokus Discussion Group</i> (FGD) bersama Direktur Pengelola Rumah Kreatif Plus Yogyakarta dalam rangka menyamakan persepsi guna percepatan pendirian rumah kreatif yang mulai disusun pada tahun anggaran 2020</p>	Belum Terealisasi Sepenuhnya	Terbatasnya waktu, SDM dan Kemampuan Keuangan Daerah

Sumber: Hasil wawancara, 2020.

Sebagaimana diketahui hasil penelitian sebelumnya bahwa dari pitu (tujuh) program janji politik kepala daerah terpilih Kabupaten Lampung Barat periode tahun 2017-2022, ada 3 (tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan yang belum terealisasi sepenuhnya. Kesimpulan penyebab utama belum terealisasinya janji politik kepala daerah terpilih Menuju Lampung Barat Hebat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017 dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu pertama yaitu terbatasnya kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lampung Barat: terbatasnya kemampuan keuangan daerah ini berdampak pada belum tercapainya target pembangunan infrastruktur misalnya saja target

pembangunan 161 ruas jalan kabupaten dengan panjang 72,56 Km karena keterbatasan anggaran maka hingga 2 (dua) tahun kepemimpinan kepala Daerah terpilih baru bisa menyelesaikan 67 ruas jalan kabupaten dengan panjang 21,79 Km, selanjutnya, untuk pembangunan jembatan hingga 2 (dua) tahun kepemimpinan kepala Daerah terpilih baru bisa menyelesaikan 4 unit jembatan dari target 8 unit jembatan serta pengembangan jalan lingkaran serbaya yang akan menghubungkan Pekon Sebarus dan Seranggas, lebih lanjut untuk pembangunan luas jaringan irigasi baru mencapai 120 hektare (Ha) areal persawahan dari target luas jaringan irigasi adalah 1.447 Ha. Demikian halnya dengan persentase

rumah tangga di Kabupaten Lampung Barat yang menggunakan listrik sampai kurun waktu 2019 baru mencapai sekitar 69,85% target 100%. Pembangunan Taman Kota Liwa terletak di seberang jalan Wisma Sindalapai belum tuntas seluruhnya seperti belum adanya drainase, pemberian lampu, ornamen dan nomenklatur.

Kedua lamanya waktu proses pengerjaan dan penyelesaian program dan kegiatan, sebagai contoh pembangunan rumah budaya yang hingga 2 (dua) tahun kepemimpinan kepala Daerah terpilih Kabupaten Lampung Barat periode tahun 2017-2022 belum juga selesai, hal tersebut berkaitan dengan bukan karena keterbatasan anggaran melainkan lamanya proses pengerjaan, dikarenakan pembangunan rumah budaya tersebut direncanakan dua lantai pertama terdapat aula dengan konsep multifungsi, bisa digunakan sebagai sarana olahraga atau kegiatan lainnya yang mempunyai daya tampung sekitar 600 orang, kalau memang lebih, bisa menampung sampai 1000 orang. Pelaksanaan pembangunan gedung budaya itu diperkirakan akan memakan waktu selama tiga tahun anggaran dengan target 2022 telah selesai bahkan sudah bisa digunakan, termasuk kegiatan penataan tamannya, pelataran parkir dan pembangunan pagarnya pun juga *clear*. Demikian halnya dengan penyelesaian penegasan tapal batas, karena penegasan tapal batas membutuhkan ketelitian, melalui tahapan, penelitian dokumen, pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar batas dan pembuatan peta batas desa hingga 2 (dua) tahun kepemimpinan kepala Daerah terpilih Kabupaten Lampung Barat periode tahun 2017-2022 baru 41 pekon yang sudah memiliki penegasan

tapal batas pekon dari target 55 pekon di kabupaten Lampung Barat.

Ketiga terbatasnya SDM yang berkompeten dalam menyelesaikan program dan kegiatan, seperti misalnya belum terealisasi nya rumah produktif dan kreatif untuk menciptakan lapangan kerja, pada kegiatan pemberdayaan pemuda dan kelompok perempuan. Hal tersebut dikarenakan pembangunan rumah produktif dan kreatif dibutuhkan perencanaan yang matang, harus menyiapkan SDM yang benar-benar profesional dibidangnya, sehingga program ini tidak sia-sia. Saat ini Pemkab Lampung Barat, melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Lambar dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para pelaku usaha sedang melaksanakan tahap *Fokus Discussion Group* (FGD) bersama Direktur Pengelola Rumah Kreatif Plus Yogyakarta dalam rangka menyamakan persepsi guna percepatan pendirian rumah kreatif yang mulai disusun pada tahun anggaran 2020 ini.

Hasil penelitian di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustin Maharani Fatmawati (2015), yang menyatakan bahwa ada 3 (tiga) faktor penyebab kurang terealisasinya program kesehatan yang di janjikan oleh Bupati Kabupaten Semarang pada saat kampanye politik, ketiga faktor penyebab tersebut adalah minimnya daya anggaran pemerintah daerah, terbatasnya SDM dan fasilitas dalam menjalankan program serta waktu penyelesaian pekerjaan program yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan masa jabatan politik Bupati adalah 5 (lima) tahun. Lebih lanjut mengutip pendapat Ahmad (2015:152) ada beberapa faktor penyebab kurang terealisasinya janji politik kepala daerah terpilih, diantaranya adalah 1) Karena tersandera

politik uang, banyak janji kampanye politik kepala daerah yang akhirnya tak terealisasi. Sebab kepala daerah, katanya, sibuk mencari cara mengembalikan “modal” yang disumbang oleh para “bandar”, akhirnya visi-misi tinggal kertas saja, 2) Lemahnya keuangan pemerintah daerah, apalagi jika daerah tersebut hanya mengandalkan PAD dan tidak mendapat suplay energi keuangan dari sumber yang lain, 3) Masa jabatan kepala daerah yang terlalu singkat, rasanya tidak mungkin merealisasikan seluruh janji politik dalam kurun 5 (lima) tahun jabatan kepala daerah.

Berkaca dari pengalaman empiris diatas oleh karena itu calon kepala daerah (cakada) yang akan berkompetisi, hendaknya merancang program, visi dan misi yang baik, serta memahami tata kelola keuangan daerah. Sebab bagaimana pun, kepala daerah harus paham posisi keuangan daerah, sumber-sumber pendapatan daerah, dan lain sebagainya yang menyangkut dengan anggaran. Lebih jauh, ada beberapa hal mendasar yang perlu dipahami oleh para calon kepala daerah (cakada) sebelum memutuskan untuk maju dalam pilkada. Pertama, terkait besaran pendapatan daerah. Kedua, apa yang kurang dan bagaimana menanggulangnya, serta apakah anggaran yang ada cukup untuk memenuhi atau mewudkan program kegiatan yang dijanjikan, kemudian yang paling penting adalah calon kepala daerah (cakada) dalam membuat program janji politik memperhitungkan proses waktu penyelesaian pekerjaan, karena masa jabatan politik itu hanya 5 (lima) tahun saja.

## **PENUTUP**

Realisasi janji politik kepala daerah terpilih Kabupaten Lampung Barat periode tahun 2017-2022, sampai

dengan 2 (dua) tahun kepemimpinannya dapat diketahui dari pitu (tujuh) program janji politik hanya ada 4 program dan 18 kegiatan yang benar sudah di realisasikan sepenuhnya, artinya dengan terealisasinya program-program ini diharapkan a) Dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dikarenakan akses jalan (inprastruktur) lebih berkualitas, irigasi pertanian memadai, serta adanya sumber penerangan PLN yang memadai b) Konflik bernuansa SARA dapat diminimalisir persatuan antar agama, suku dan ras dapat terjalin serta kebudayaan masyarakat dapat terjaga dan lestari dengan dibangunnya gedung kebudayaan c) Angka putus sekolah dan buta aksara menurun, angka partisipasi murni mulai dari jenjang sekolah dasar sampai menengah meningkat, semua anak bisa mengenyam bangku pendidikan d) Meningkatkan derajat hidup sehat, semua masyarakat dapat menikmati fasilitas pelayanan kesehatan tanpa harus memikirkan biaya pengobatan e) Pembangunan pertanian dapat meningkat, petani dan keluarga dapat hidup lebih sejahtera, meringankan biaya produksi petani dengan adanya bantuan pupuk serta alusista pertanian f) Pelayanan terhadap publik dapat lebih cepat, tepat, transparan dengan adanya terobosan e-pelayanan g) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat menjadikan Kabupaten Lampung Barat sebagai kota agamis.

Faktor penghambat belum terealisasinya janji politik kepala daerah terpilih Menuju Lampung Barat Hebat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017 dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu 1). Terbatasnya kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lampung Barat, 2) lamanya waktu proses pengerjaan dan penyelesaian program dan kegiatan dan

3) Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam menyelesaikan program dan kegiatan

### Saran

Adapun saran yang penulis ajukan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk merealisasikan janji politik, hendaknya kepala daerah terpilih Kabupaten Lampung Barat periode tahun 2017-2022, mengajukan usulan bantuan anggaran dari pusat, misalnya untuk mengatasi keterbatasan anggaran pada pembangunan infrastruktur maka pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat melalui instansi terkait dapat mengajukan usulan bantuan anggaran kepada Kementrian PUPR pusat, demikian halnya dengan keterbatasan anggaran dalam mensejahterakan petani, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat melalui instansi terkait dapat mengajukan usulan bantuan anggaran kepada Kementrian Pertanian RI, hal yang sama juga pada pembangunan kota budaya, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat melalui instansi terkait dapat mengajukan usulan bantuan anggaran kepada Kemendikbud RI. Kemudian hendaknya instansi terkait seperti Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat lebih meningkatkan pendapatan dari sekor pajak dan retribusi daerah, dengan demikian diharapkan kemampuan keuangan daerah akan meningkat sehingga pembiayaan untuk merealisasikan janji politik dapat tercover.
2. Berkaitan dengan terbatasnya SDM untuk merealisasikan janji politik pada kegiatan pembangunan rumah produktif dan kreatif, hendaknya kepala daerah terpilih Kabupaten Lampung Barat periode tahun 2017-2022 dapat bekerjasama dengan pihak ke 3 (tiga) atau konsultan Dirjen UMKM pusat, dengan harapan pihak-pihak tersebut dapat memberikan masukan-masukan yang berguna dalam merealisasikan janji politik berkaitan dengan pembangunan rumah produktif dan kreatif.
3. Berkaitan dengan singkatnya masa jabatan politik dalam merealisasikan janji politik, hendaknya kepala daerah terpilih Kabupaten Lampung Barat periode tahun 2017-2022 lebih memprioritas pembangunan mana saja yang lebih dibutuhkan masyarakat, dengan demikian diharapkan janji-janji politik yang ditawarkan oleh Bupati Terpilih dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Lampung Barat.
4. Hendaknya kepala daerah terpilih Kabupaten Lampung Barat periode tahun 2017-2022 beserta seluruh instansi terkait benar-benar memiliki komitmen yang kuat dalam dalam upaya merealisasikan janji politik, karena betapun tangguhnya kemampuan keuangan daerah, betapun kompetennya SDM yang disiapkan untuk merealisasikan janji politik, namun jika tidak didukung dengan komitmen yang kuat rasanya sulit untuk direalisasikan.
5. Hendaknya masyarakat Kabupaten Lampung Barat lebih aktif berpartisipasi dalam mendukung program kerja kepala daerah terpilih Kabupaten Lampung Barat periode

tahun 2017-2022, menjaga dan merawat hasil pembangunan, dengan demikian diharapkan pembangunan yang sudah direalisasikan oleh kepala daerah terpilih dapat terjaga lestari, karena jika hasil pembangunan tidak dijaga dan dirawat maka akan cepat dan mudah rusak, walaupun akan diperbaiki maka akan memakan anggaran dan waktu lagi untuk memulihkan hasil pembangunan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Maharani Fatmawati, (2015). *Realisasi Janji Kampanye Program Kesehatan Bupati Semarang Periode 2010-2015*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Ahmad, Nadir, 2015, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Malang: Averroes Press.
- Budiarjo, Miriam, 2008, *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Etjung Widhiarto, Slamet Rosyadi, dan Denok Kurniasih. 2016. *Studi Formulasi Kebijakan Kartu Banyumas Sehat Di Kabupaten Banyumas*. Volume 2: No 1 Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman.
- Firmanzah, 2011, *Partai Politik Sebagai Kendaraan Demokrasi*, Jakarta: Grasindo
- Ghafur, Jamaludin, 2015, *Hukum Tata Negara, Studi Hukum dan Konstitusi*, Jakarta: FH UI
- Hampton, 2009, *Social Contract*. In *Cambridge Dictionary of Philosophy*. Robert Audi, ed. 855. London: Cambridge University Press.
- Helen Pascalia Sitompul, (2016). *Politik Kepala Daerah (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Politik Khairuddin Syah Dengan Janji – Janji Politik Periode 2010 – 2015 Di Kabupaten Labuhan Batu Utara)*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
- Philips, Ann. 2016. *The Politics of Presence Edisi Terjemahan dan Revisi*. Bandung: PT Elek Inti Media.
- Rahayu, Surtiati dkk, 2010, *Kontrak Sosial, Terjemahan*, Jakarta : Dian Rakyat.
- Setiawan, Joni, dan Sudrajat Ajat. 2018. *Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya terhadap Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Elek Media Inti
- Sutoro, Eko. 2013, *Transisi Demokrasi Indonesia, Menuju Indonesia Sejahtera*, Yogyakarta : APMD Press